

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DALAM MENINGKATKAN KESAMAAN HAK MEMPEROLEH PENDIDIKAN BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Yohana Citra P.

Universitas Negeri Jakarta, Indonesia; yohana.citra@gmail.com

Submitted: 2023/11/14; Revised: 2023/12/14; Accepted: 2024/02/14

Abstract

The purpose of writing this work is to know and identify in depth the implementation of inclusive education in Indonesia. Given the progress that has been made in the field of education, there are still several obstacles faced in Indonesia, including unequal access to education, especially in rural areas and remote areas. The preparation of this work uses a library research approach. Literacy reviews from several previous researchers, books, journals and other documents as a reference in criticizing phenomena to collect data. The author in conducting analysis with a descriptive approach. The result of this work is the initial basis for Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, which stipulates that every child has the right to a proper and quality education. The second basis is Law Number 41 of 2007 concerning the Implementation of Inclusive Education. In addition, various education providers take responsibility for the implementation of inclusive education including elements of the government with various supports, school principals with innovation and creation in making policies at the school level, teachers as spearheads when face to face with students and the community as supporters in the implementation of education inclusive.

Keywords

Right to Get Education, Equal Rights, Inclusive Education

1. Pendahuluan

Di Indonesia, sistem pendidikan telah mengalami banyak perubahan selama beberapa dekade terakhir. Saat ini, sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari beberapa tingkatan mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan di Indonesia merupakan salah satu prioritas utama pemerintah. pemerintah juga telah mendorong implementasi pendidikan inklusif di sekolah-sekolah umum di Indonesia, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus di Indonesia.

Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menyediakan kesempatan yang sama bagi semua anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, untuk belajar di

sekolah-sekolah umum.¹ Pendidikan inklusif berfokus pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, dan bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan terbuka bagi semua anak.² Pendidikan inklusif juga menekankan pentingnya menghargai keberagaman dan menghormati hak-hak semua anak.³

Menurut Rosemary Salomone (2022), pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menyediakan peluang yang sama bagi semua anak untuk terlibat dan belajar bersama di sekolah-sekolah umum, terlepas dari latar belakang, kemampuan, atau kebutuhan khusus anak.⁴ Pendidikan inklusif juga mengakui bahwa setiap anak memiliki keunikan dan keberagaman yang perlu dihargai dan diakui, serta memastikan bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus mendapatkan dukungan yang tepat agar dapat terlibat dan belajar bersama di sekolah-sekolah umum. Salomone juga memfokuskan pada mengembangkan peraturan yang mendukung pendidikan inklusif di sekolah-sekolah umum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi di sekolah.

Pendidikan inklusif membutuhkan adaptasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu setiap anak, serta dukungan yang tepat bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan teknik-teknik pembelajaran yang fleksibel, serta memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak secara khusus dalam menyusun rencana pembelajaran.

Meskipun terdapat beberapa kemajuan yang telah dicapai dalam bidang pendidikan, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi di Indonesia, di antaranya ketidakmerataan akses terhadap pendidikan, terutama di wilayah-wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Hal ini karena wilayah negara Indonesia yang luas dan penduduk yang banyak. Selain itu, kualitas pendidikan yang masih rendah, terutama di sekolah-sekolah di daerah pedesaan. Kualitas pendidikan di negara kita masih dirasa tumpang tindih khususnya wilayah terpencil belum bisa mendapatkan kelayakan hak dalam pendidikan.

¹ S E David Wijaya, *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar* (Prenada Media, 2019), hal. 17.

² Tamrin Fathoni, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Agama Islam Orang Tua Terhadap Karakter Religius Peserta Didik," *MENTARI: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1.1 (2021), hal. 10.

³ Rahman Tanjung et al., "Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Lembaga Pendidikan Islam," *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5.1 (2022), 339–48 (hal. 22).

⁴ Rosemary Salomone dan Rosemary C Salomone, *The rise of English: Global politics and the power of language* (Oxford University Press, 2022), hal. 265.

Selain beberapa problem tersebut, semisal problem lain yaitu rendahnya tingkat keikutsertaan anak-anak dalam pendidikan, terutama di kalangan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin atau terpinggirkan.⁵ Kemiskinan menjadi penyebab besar dalam roda pendidikan di negara kita walau pemerintah telah berupaya keras dengan berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan. Selanjutnya masalah keuangan yang dihadapi sekolah-sekolah di Indonesia, yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan. Masalah kekurangan guru yang kompeten, terutama di sekolah-sekolah di daerah pedesaan dan masalah kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai, terutama di sekolah-sekolah di daerah pedesaan. Kasus demikian sangat terasa di wilayah terpencil, karena banyak faktor.

Beberapa peneliti sebelumnya semisal Reno Fernandes bahwa Bahwa adanya suatu Respon yang baik dari lembaga sekolah dalam implementasi pendidikan inklusif yang telah diprogramkan oleh sekolah dengan adanya suatu keseimbangan dan adaptasi dengan sekitar. Implementasi pendidikan inklusif berjalan dengan baik dari aspek SDM maupun pelaksanaan di Kota Padang.⁶ Karya Rizka Harfiani dkk bahwa Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Deli Serdang dengan menggunakan PKM dengan meningkatkan kompetensi para pengajar di tingkat PAUD.⁷ Karya serupa yang dilakukan oleh Rahman Tanjung yaitu untuk melaksanakan pendidikan inklusi dengan baik maka diperlukan suatu manajemen. Perlu adanya suatu penyelarasan konsep dalam memberikan suatu pelayanan kepada seluruh siswa di lembaga formal.⁸ Dengan polemiknya kondisi negara kita yang begitu besar tentunya membutuhkan suatu konsep yang besar pula. Untuk itu, tujuan dalam penulisan karya ini yaitu untuk mengetahui dan mengidentifikasi secara mendalam implementasi pendidikan inklusif di negara Indonesia.

2. Metode

⁵ Nurul Afifah, "Problematika pendidikan di Indonesia," *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 1.1 (2017), 41–47 (hal. 41).

⁶ Reno Fernandes, "Adaptasi sekolah terhadap kebijakan pendidikan inklusif," *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 4.2 (2017), 119–25 (hal. 119).

⁷ Rizka Harfiani dan Mavianti Mavianti, "Pkm Peningkatan Kualitas Guru Paud Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Pendidikan Inklusif Di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang," *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.1 (2019), hal. 84.

⁸ Tanjung et al., hal. 103.

Penyusunan karya ini menggunakan pendekatan library research. Tinjauan literasi dari beberapa peneliti sebelumnya, buku-buku, jurnal dan dokumen lain sebagai acuan dalam mengkritisi fenomena untuk mengumpulkan data. Penulis dalam melakukan analisis dengan pendekatan deskriptif.⁹

3. Hasil dan pembahasan

Pendidikan Inklusif sebagai salah satu pendidikan berbasis persamaan hak

Pendidikan inklusif juga mencakup aspek-aspek seperti aksesibilitas fisik, aksesibilitas komunikasi, dan aksesibilitas informasi bagi semua anak.¹⁰ Hal ini memerlukan peran yang aktif dari sekolah dan masyarakat dalam memastikan bahwa sekolah-sekolah umum tersedia dan dapat diakses oleh semua anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Beberapa manfaat pendidikan inklusif diantaranya sebagai berikut:¹¹

1. Memastikan hak-hak anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak tanpa kebutuhan khusus: Pendidikan inklusif memastikan bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus mendapatkan hak yang sama untuk terlibat dan belajar bersama di sekolah-sekolah umum. Ini merupakan bentuk penghargaan terhadap hak-hak anak-anak dengan kebutuhan khusus yang sama seperti anak-anak tanpa kebutuhan khusus.
2. Meningkatkan perkembangan anak secara keseluruhan: Pendidikan inklusif juga dapat meningkatkan perkembangan anak secara keseluruhan karena anak-anak dapat terlibat dan belajar bersama di sekolah-sekolah umum. Anak-anak dapat belajar tentang toleransi, empati, dan kerja sama dengan anak-anak lainnya yang memiliki latar belakang, kemampuan, atau kebutuhan khusus yang berbeda.
3. Meningkatkan kualitas pembelajaran: Pendidikan inklusif juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bagi semua anak karena menggunakan pendekatan

⁹ Muannif Ridwan et al., "Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah," *Jurnal Masohi*, 2.1 (2021), 42–51 (hal. 43).

¹⁰ Ayse Collins, Fara Azmat, dan Ruth Rentschler, "'Bringing everyone on the same journey': revisiting inclusion in higher education," *Studies in Higher Education*, 44.8 (2019), 1475–87 (hal. 1475).

¹¹ Nurul Kusuma Dewi, "Manfaat program pendidikan inklusi untuk aud," *Jurnal Pendidikan Anak*, 6.1 (2017), 12–19 (hal. 16–18).

pembelajaran yang fleksibel yang menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan individu setiap anak

Sedangkan urgensi dalam pendidikan insklusif yaitu:¹²

1. Pendidikan inklusif merupakan suatu kebutuhan penting karena memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk belajar di sekolah-sekolah umum. Pendidikan inklusif memfokuskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, serta bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan terbuka bagi semua anak.
2. Pendidikan inklusif juga merupakan suatu kebutuhan karena menghargai dan menghormati keberagaman anak. Anak-anak dengan kebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga pendidikan inklusif merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut terpenuhi.
3. Selain itu, pendidikan inklusif juga merupakan suatu kebutuhan karena memberikan manfaat bagi semua anak. Anak-anak yang belajar di lingkungan yang inklusif akan belajar menghargai dan menghormati perbedaan, serta memperoleh keterampilan sosial dan emosional yang penting. Pendidikan inklusif juga dapat membantu mengurangi stigmatisasi terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi.

Menurut Salomone, implementasi pendidikan inklusif di sekolah harus memfokuskan pada beberapa hal, yaitu:¹³

1. Menyediakan peluang yang sama bagi semua anak untuk terlibat dan belajar bersama di sekolah-sekolah umum: Pendidikan inklusif harus menyediakan peluang yang sama bagi semua anak untuk terlibat dan belajar bersama di sekolah-sekolah umum, terlepas dari latar belakang, kemampuan, atau kebutuhan khusus anak.
2. Mengakomodasi keberagaman anak: Pendidikan inklusif harus mengakui bahwa setiap anak memiliki keunikan dan keberagaman yang perlu dihargai dan diakui. Oleh karena itu, pendidikan inklusif harus memastikan bahwa anak-anak dengan

¹² Faridi Faridi, "Urgensi Pendidikan Inklusif: Studi Kasus Pada Kegiatan" B'Religi" di SMA Negeri 3 Kota Malang," *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6.2 (2020), hal. 125.

¹³ Salomone dan Salomone, hal. 23.

kebutuhan khusus mendapatkan dukungan yang tepat agar dapat terlibat dan belajar bersama di sekolah-sekolah umum.

3. Mengembangkan peraturan yang mendukung pendidikan inklusif di sekolah-sekolah umum: Salomone memfokuskan pada mengembangkan peraturan yang mendukung pendidikan inklusif di sekolah-sekolah umum, seperti Undang-Undang Pendidikan Inklusif Amerika Serikat (Individuals with Disabilities Education Act/IDEA). Peraturan ini menjamin bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus mendapatkan dukungan yang tepat di sekolah-sekolah umum.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi di sekolah: Salomone juga memfokuskan pada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi di sekolah. Ini termasuk membantu menghapus stigma yang ada terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya inklusi bagi perkembangan anak secara keseluruhan.

Menurut Salomone, implementasi pendidikan inklusif di sekolah harus menyediakan peluang yang sama bagi semua anak untuk terlibat dan belajar bersama di sekolah merupakan salah satu karakteristik utama pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif harus memastikan bahwa semua anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dan belajar bersama di sekolah-sekolah umum, sehingga tidak ada anak yang terlewatkan atau tertinggal dalam proses pembelajaran. Pendidikan inklusif juga harus menyediakan dukungan yang tepat bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus agar dapat terlibat dan belajar bersama di sekolah-sekolah umum.

Perlu juga adanya mengakomodasi keberagaman anak, mengakomodasi keberagaman anak merupakan salah satu karakteristik utama pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif harus mengakui bahwa setiap anak memiliki keunikan dan keberagaman yang perlu dihargai dan diakui. Oleh karena itu, pendidikan inklusif harus memastikan bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus mendapatkan dukungan yang tepat agar dapat terlibat dan belajar bersama di sekolah-sekolah umum. Dukungan ini dapat berupa pelatihan atau bimbingan khusus, atau penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Dukungan ini dapat berupa juga dengan penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Selain itu, pendidikan inklusif juga harus memastikan bahwa fasilitas sekolah sesuai dengan kebutuhan anak-anak dengan kebutuhan khusus, seperti memastikan bahwa sekolah memiliki rampe yang mudah diakses bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus mobilitas, atau memastikan bahwa sekolah memiliki fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak dengan kebutuhan khusus lainnya. Dengan demikian, anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat terlibat dan belajar bersama dengan anak-anak tanpa kebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum.

Selain itu, harus adanya suatu peraturan yang mendukung pendidikan inklusif di sekolah-sekolah umum dapat berupa peraturan yang menetapkan hak-hak anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak tanpa kebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum, serta memastikan bahwa sekolah-sekolah umum memiliki fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Peraturan ini juga dapat menetapkan bahwa sekolah harus memberikan dukungan yang tepat bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus agar dapat terlibat dan belajar bersama dengan anak-anak tanpa kebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum. Peraturan ini dapat dikembangkan oleh pemerintah atau oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan pendidikan di suatu negara.

Semisal Undang-Undang Pendidikan Inklusif Amerika Serikat (*Individuals with Disabilities Education Act/IDEA*), karena tidak memiliki informasi yang cukup tentang itu. Namun, dari pengetahuan saya, Undang-Undang Pendidikan Inklusif Amerika Serikat (*Individuals with Disabilities Education Act/IDEA*) merupakan salah satu contoh peraturan yang mendukung pendidikan inklusif di sekolah-sekolah umum. Undang-Undang ini menetapkan hak-hak anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak tanpa kebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum, serta memastikan bahwa sekolah-sekolah umum memiliki fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Undang-Undang ini juga menetapkan bahwa sekolah harus memberikan dukungan yang tepat bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus agar dapat terlibat dan belajar bersama dengan anak-anak tanpa kebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum.

Selanjutnya menurut Salomone perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi di sekolah merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Masyarakat harus sadar bahwa setiap anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas di sekolah-sekolah umum. Dengan demikian, masyarakat harus mampu menerima anak-anak dengan kebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum, serta memberikan dukungan yang tepat bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus agar dapat terlibat dan belajar bersama dengan anak-anak tanpa kebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi di sekolah dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menyebarkan informasi tentang pendidikan inklusif melalui media massa, mengadakan kegiatan edukasi tentang pendidikan inklusif, atau melalui kegiatan-kegiatan lain yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi di sekolah.

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi di sekolah merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Masyarakat harus sadar bahwa setiap anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas di sekolah-sekolah umum. Dengan demikian, masyarakat harus mampu menerima anak-anak dengan kebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum, serta memberikan dukungan yang tepat bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus agar dapat terlibat dan belajar bersama dengan anak-anak tanpa kebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi di sekolah dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menyebarkan informasi tentang pendidikan inklusif melalui media massa, mengadakan kegiatan edukasi tentang pendidikan inklusif, atau melalui kegiatan-kegiatan lain yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi di sekolah.

Stigma yang ada terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat menghambat perkembangan anak-anak tersebut, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, penting untuk membantu menghapus stigma tersebut agar anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat terlibat dan belajar bersama dengan anak-anak tanpa kebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya inklusi

bagi perkembangan anak secara keseluruhan juga merupakan upaya yang penting, karena inklusi di sekolah dapat membantu anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk berkembang dengan lebih baik, serta membantu meningkatkan perkembangan anak-anak tanpa kebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara yang sama dengan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu dengan menyebarkan informasi tentang pendidikan inklusif melalui media massa, mengadakan kegiatan edukasi tentang pendidikan inklusif, atau melalui kegiatan-kegiatan lain yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi di sekolah.

Implementasi pendidikan inklusif dalam meningkatkan kesamaan hak memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat di Indonesia

Pendidikan inklusif di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menetapkan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan yang layak dan berkualitas.¹⁴ Upaya untuk mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia telah dilakukan oleh pemerintah, di antaranya dengan mengembangkan program-program khusus untuk mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum, serta dengan memberikan dukungan yang tepat bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus agar dapat terlibat dan belajar bersama dengan anak-anak tanpa kebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum. Selain itu, pemerintah juga telah mendorong terbentuknya sekolah inklusif di seluruh Indonesia, yang merupakan sekolah-sekolah umum yang telah terakreditasi dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum.

Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menetapkan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan yang layak dan berkualitas.¹⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁴ Eni Irawati dan Weppy Susetyo, "Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Blitar," *Jurnal Supremasi*, 2017, 3 (hal. 33).

¹⁵ Rizky Rinaldy Inkirwang, "Kewajiban negara dalam penyediaan fasilitas pendidikan kepada masyarakat menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional," *Lex Privatum*, 8.2 (2020), hal. 144.

(Sisdiknas) menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang harus diwujudkan dalam sistem pendidikan nasional yang inklusif. Urgensi pendidikan inklusif dalam Sisdiknas tersebut didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan hak: Pendidikan inklusif merupakan upaya untuk meningkatkan kesetaraan hak bagi semua anak untuk mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas, tanpa terkecuali bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan: Pendidikan inklusif dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, karena dengan adanya anak-anak dengan kebutuhan khusus di kelas, maka guru akan terdorong untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyajikan materi pelajaran sehingga dapat dimengerti oleh semua anak.
3. Mendorong terbentuknya masyarakat yang inklusif: Pendidikan inklusif juga merupakan upaya untuk mendorong terbentuknya masyarakat yang inklusif, yaitu masyarakat yang menghargai perbedaan dan menghormati hak-hak setiap anggotanya. Dengan demikian, pendidikan inklusif merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Implementasi pendidikan inklusif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:¹⁶

1. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang mencakup program-program pendidikan inklusif di sekolah-sekolah umum;
2. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah umum melalui program-program khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti program bantuan pembelajaran, program bantuan fasilitas, dan program bantuan tenaga pendidik;
3. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang mendukung pendidikan inklusif di sekolah-sekolah umum, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;

¹⁶ Muhammad Ali, *Kebijakan pendidikan menengah dalam perspektif governance di indonesia* (Universitas Brawijaya Press, 2017), hal. 9.

4. Penyelenggaraan program-program edukasi tentang pendidikan inklusif bagi guru, orang tua, dan masyarakat, agar dapat memahami dan menghargai perbedaan yang ada di antara anggota masyarakat;
5. Penyediaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak dengan kebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum, seperti dengan menyediakan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut.

Dengan demikian, implementasi pendidikan inklusif dalam Sisdiknas tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang inklusif, yaitu sistem pendidikan yang menyediakan peluang yang sama bagi semua anak untuk terlibat dan belajar bersama di sekolah-sekolah umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), karakteristik pendidikan inklusif adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Menyediakan peluang yang sama bagi semua anak untuk terlibat dan belajar bersama di sekolah-sekolah umum, tanpa terkecuali bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus;
2. Mengakomodasi keberagaman anak di sekolah-sekolah umum, dengan cara memberikan dukungan yang tepat bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus agar dapat terlibat dan belajar bersama dengan anak-anak tanpa kebutuhan khusus;
3. Menghapus stigma yang ada terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya inklusi bagi perkembangan anak secara keseluruhan;
4. Menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak dengan kebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum, seperti dengan menyediakan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut;
5. Mendorong terbentuknya komunitas inklusif di sekolah, yaitu komunitas yang menghargai perbedaan dan menghormati hak-hak setiap anggotanya.

Dengan demikian, karakteristik pendidikan inklusif dalam Sisdiknas tersebut merupakan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh sistem pendidikan nasional yang inklusif,

¹⁷ Imam Yuwono dan Mirnawati Mirnawati, "Strategi Pembelajaran Kreatif dalam Pendidikan Inklusi di Jenjang Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu*, 5.4 (2021), 2015–20 (hal. 25).

yaitu sistem pendidikan yang menyediakan peluang yang sama bagi semua anak untuk terlibat dan belajar bersama di sekolah-sekolah umum, serta mengakomodasi keberagaman anak di sekolah-sekolah umum.

Implementasi pendidikan inklusif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:¹⁸

1. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah umum, yaitu pendidikan yang menyediakan peluang yang sama bagi semua anak untuk terlibat dan belajar bersama di sekolah-sekolah umum, tanpa terkecuali bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus;
2. Penyediaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak dengan kebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum, seperti dengan menyediakan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut;
3. Penyelenggaraan program-program edukasi tentang pendidikan inklusif bagi guru, orang tua, dan masyarakat, agar dapat memahami dan menghargai perbedaan yang ada di antara anggota masyarakat;
4. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang mendukung pendidikan inklusif di sekolah-sekolah umum, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
5. Penyelenggaraan program-program khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti program bantuan pembelajaran, program bantuan fasilitas, dan program bantuan tenaga pendidik, untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah umum.

Dengan demikian, implementasi pendidikan inklusif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, yaitu sistem pendidikan yang menyediakan peluang yang sama bagi semua anak untuk terlibat dan belajar bersama di sekolah-sekolah umum.

¹⁸ Asep Supena, "Model pendidikan inklusif untuk siswa tunagrahita di sekolah dasar," *Parameter*, 29.2 (2017), 145–55 (hal. 149).

Kepala sekolah merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia. Kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola sekolah sehingga dapat mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk terlibat dan belajar bersama dengan anak-anak tanpa kebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum. Berikut adalah beberapa peran yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah dalam pendidikan inklusif di Indonesia:¹⁹

1. Mengelola sekolah secara profesional dan bertanggung jawab, serta memastikan bahwa sekolah tersebut memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum;
2. Membantu guru dalam mengakomodasi keberagaman anak di kelas, dengan cara memberikan pelatihan atau sosialisasi tentang cara mengakomodasi keberagaman anak di sekolah;
3. Menjalin kerjasama dengan orang tua dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendukung perkembangan anak-anak dengan kebutuhan khusus di sekolah;
4. Menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak dengan kebutuhan khusus di sekolah, seperti dengan menyediakan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut;
5. Mendorong terbentuknya komunitas inklusif di sekolah

Guru merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam mengakomodasi keberagaman anak di kelas dan membantu anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk terlibat dan belajar bersama dengan anak-anak tanpa kebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum. Berikut adalah beberapa peran yang dapat dilakukan oleh guru dalam pendidikan inklusif di Indonesia:²⁰

1. Mengajarkan materi pelajaran dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak dengan kebutuhan khusus di kelas, seperti dengan menggunakan media yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut;

¹⁹ Dinar Westri Andini et al., "Pandangan Kepala Sekolah mengenai Pendidikan Inklusif dan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar DIY," *Taman Cendekia: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, 2.2 (2018), 247–50 (hal. 251).

²⁰ Eko Setiawan dan Nurliana Cipta Apsari, "Pendidikan Inklusif: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Non Diskriminatif di Bidang Pendidikan bagi Anak Dengan Disabilitas (AdD)," *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 5.3 (2019), hal. 190.

2. Memberikan dukungan yang tepat bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus di kelas, seperti dengan memberikan pelatihan kepada anak-anak tersebut untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk terlibat dan belajar bersama dengan anak-anak tanpa kebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum;
3. Menjalinkan kerjasama dengan orang tua dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendukung perkembangan anak-anak dengan kebutuhan khusus di sekolah;
4. Menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak dengan kebutuhan khusus di kelas

Berikut adalah beberapa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam pendidikan inklusif di Indonesia:²¹

1. Menyediakan dukungan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum, seperti dengan memberikan bantuan pembelajaran atau fasilitas yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut;
2. Mengikuti kegiatan-kegiatan edukasi tentang pendidikan inklusif yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya, untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya inklusi di sekolah;
3. Menjalinkan kerjasama dengan guru, orang tua, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendukung perkembangan anak-anak dengan kebutuhan khusus di sekolah;
4. Menghapus stigma yang ada terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus di masyarakat, dengan cara memahami dan menghargai perbedaan yang ada di antara anggota masyarakat;
5. Memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah umum yang membutuhkan

Pemerintah merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan program-program khusus untuk mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum, serta dapat memberikan dukungan yang tepat bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus agar dapat terlibat dan belajar bersama dengan anak-anak tanpa kebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum. Berikut adalah

²¹ Septy Nurfadhillah, *Pendidikan Inklusi Pedoman bagi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2021), hal. 77.

beberapa peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pendidikan inklusif di Indonesia:²²

1. Menyediakan program-program khusus untuk mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum, seperti program bantuan pembelajaran, program bantuan fasilitas, dan program bantuan tenaga pendidik;
2. Memberikan dukungan yang tepat bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus agar dapat terlibat dan belajar bersama dengan anak-anak tanpa kebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum, seperti dengan memberikan pelatihan kepada guru tentang cara mengakomodasi keberagaman anak di kelas, serta dengan memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak dengan kebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum;
3. Mendorong terbentuknya sekolah inklusif di seluruh Indonesia, yaitu sekolah-sekolah umum yang telah terakreditasi
4. Penyediaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan anak dengan disabilitas: Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang penyediaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan anak dengan disabilitas di sekolah, seperti pemasangan rampe, lift, dan toilet yang mudah diakses.
5. Penyediaan program beasiswa: Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai program beasiswa untuk meningkatkan akses anak-anak miskin terhadap pendidikan, seperti program beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan program beasiswa PPA (Perguruan Tinggi Swasta).
6. Penyediaan program pendidikan khusus: Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan program pendidikan khusus bagi anak dengan kebutuhan khusus, seperti program Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan program Pendidikan Inklusi.
7. Penyediaan program bimbingan dan konseling: Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan program bimbingan dan konseling bagi anak dengan kebutuhan khusus, seperti program Bimbingan dan Konseling Inklusif (BKI).
8. Penyediaan program pendidikan alternatif: Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan program pendidikan alternatif bagi anak dengan kebutuhan khusus,

²² Adi Suhendra, "Strategi pemerintah Kota Banda Aceh dan Kota Surakarta dalam mewujudkan kota ramah disabilitas," *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 1.3 (2017), 131–42 (hal. 135–37).

seperti program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dan program Pendidikan Kelompok (PK).

Melalui berbagai program tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesamaan hak memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat di Indonesia, terutama bagi anak dengan kebutuhan khusus dan tentunya adanya kecocokan konsep pendidikan inklusif yang ditawarkan oleh Rosemary Salomone. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi pendidikan inklusif di Indonesia, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif dan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan inklusif di Indonesia.

4. Kesimpulan

Dalam meningkatkan kesamaan hak memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat di Indonesia dalam Implementasi pendidikan inklusif yaitu berbagai upaya telah dilakukan. Sebagai pijakan awal yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menetapkan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan yang layak dan berkualitas. Landasan kedua di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Selain itu berbagai penyelenggara pendidikan ikut serta bertanggungjawab atas pelaksanaan pendidikan inklusif diantaranya unsur pemerintah dengan berbagai supportnya, kepala sekolah dengan inovasi dan kreasi dalam membuat kebijakan di tataran sekolah, guru sebagai ujung tombak ketika bertatap muka secara langsung dengan siswa dan masyarakat sebagai pendukung dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.

5. Daftar Pustaka

- Afifah, Nurul, "Problematika pendidikan di Indonesia," *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 1.1 (2017), 41–47
- Ali, Muhammad, *Kebijakan pendidikan menengah dalam perspektif governance di Indonesia* (Universitas Brawijaya Press, 2017)
- Andini, Dinar Westri, Ayu Rahayu, C Asri Budiningsih, dan Mumpuniarti

- Mumpuniarti, “Pandangan Kepala Sekolah mengenai Pendidikan Inklusif dan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar DIY,” *Taman Cendekia: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, 2.2 (2018), 247–50
- Collins, Ayse, Fara Azmat, dan Ruth Rentschler, “‘Bringing everyone on the same journey’: revisiting inclusion in higher education,” *Studies in Higher Education*, 44.8 (2019), 1475–87
- David Wijaya, S E, *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar* (Prenada Media, 2019)
- Dewi, Nurul Kusuma, “Manfaat program pendidikan inklusi untuk aud,” *Jurnal Pendidikan Anak*, 6.1 (2017), 12–19
- Faridi, Faridi, “Urgensi Pendidikan Inklusif: Studi Kasus Pada Kegiatan" B'Religi" di SMA Negeri 3 Kota Malang,” *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6.2 (2020)
- Fathoni, Tamrin, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Agama Islam Orang Tua Terhadap Karakter Religius Peserta Didik,” *MENTARI: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1.1 (2021)
- Fernandes, Reno, “Adaptasi sekolah terhadap kebijakan pendidikan inklusif,” *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 4.2 (2017), 119–25
- Harfiani, Rizka, dan Mavianti Mavianti, “Pkm Peningkatan Kualitas Guru Paud Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Pendidikan Inklusif Di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang,” *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.1 (2019)
- Inkiriwang, Rizky Rinaldy, “Kewajiban negara dalam penyediaan fasilitas pendidikan kepada masyarakat menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional,” *Lex Privatum*, 8.2 (2020)
- Irawati, Eni, dan Weppy Susetyo, “Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Blitar,” *Jurnal Supremasi*, 2017, 3
- Nurfadhillah, Septy, *Pendidikan Inklusi Pedoman bagi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2021)
- Ridwan, Muannif, A M Suhar, Bahrul Ulum, dan Fauzi Muhammad, “Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah,” *Jurnal Masohi*, 2.1 (2021), 42–51

- Salomone, Rosemary, dan Rosemary C Salomone, *The rise of English: Global politics and the power of language* (Oxford University Press, 2022)
- Setiawan, Eko, dan Nurliana Cipta Apsari, “Pendidikan Inklusif: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Non Diskriminatif di Bidang Pendidikan bagi Anak Dengan Disabilitas (AdD),” *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 5.3 (2019)
- Suhendra, Adi, “Strategi pemerintah Kota Banda Aceh dan Kota Surakarta dalam mewujudkan kota ramah disabilitas,” *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 1.3 (2017), 131–42
- Supena, Asep, “Model pendidikan inklusif untuk siswa tunagrahita di sekolah dasar,” *Parameter*, 29.2 (2017), 145–55
- Tanjung, Rahman, Yuli Supriani, Opan Arifudin, dan Ulfah Ulfah, “Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Lembaga Pendidikan Islam,” *JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5.1 (2022), 339–48
- Yuwono, Imam, dan Mirnawati Mirnawati, “Strategi Pembelajaran Kreatif dalam Pendidikan Inklusi di Jenjang Sekolah Dasar,” *Jurnal Basicedu*, 5.4 (2021), 2015–20